



ANALISIS RUANG PUBLIK (PUBLIC SPHERE) ANTAR BUDAYA (STUDI PADA KOMUNITAS BANGBANG WETAN)

Respati Rafsanjani, Roziana Febrianita

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Abstrak

BangBang Wetan menjelma menjadi sebuah ruang publik yang majemuk, Peneliti tertarik dengan BangBang Wetan dikarenakan BangBang Wetan merupakan sebuah komunitas atau forum diskusi yang melakukan ruang diskusi antar budaya serta konsep diskusi yang berbeda dari forum atau komunitas lainnya. Penelitian ini mengeksplorasi tentang ruang publik dalam konteks komunitas BangBang Wetan di Surabaya yang dilaksanakan satu bulan sekali. Menggunakan teori Ruang Publik oleh Jurgenn Habermas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi dan wawancara mendalam untuk menganalisis bagaimana prinsip ruang publik Habermas diterapkan oleh BangBang Wetan, serta bagaimana BangBang Wetan mewadahi kemajemukan. Penelitian ini menitikberatkan pada BangBang Wetan sebagai sebuah Ruang Publik antar budaya yang diperlukan pada masa saat ini. Lebih lanjut penelitian ini terungkap bahwa prinsip egaliter dengan tercerminnya interaksi antara narasumber dan audiens yang tidak memiliki batas fisik maupun non-fisik. Prinsip inklusif yang terbuka bagi siapa saja untuk hadir dan turut meramaikan jalannya diskusi serta Bebas dari dominasi yang diwujudkan dalam otonomi BangBang Wetan yang tidak terikat oleh kekuasaan absolut.

Kata Kunci: Ruang Publik, BangBang Wetan, Komunitas, Antar Budaya.

PENDAHULUAN

Kebudayaan dalam peradaban manusia selalu melibatkan aspek sejarah dan sosial. Selama berabad-abad manusia selalu berkembang melalui

kebudayaan mereka masing-masing, dalam hubungan dan interaksi tersebut, manusia berupaya untuk mengembangkan diri dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupannya. Segala bentuk usaha dan upaya manusia,

*Correspondence Address : respatirafsanjani1@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i3.2025. 988-994

© 2025UM-Tapsel Press

dalam segala wujudnya, merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai alat dan usaha manusia untuk memperbaiki dan mengembangkan berbagai potensi serta aspek jiwa dan raganya.

Menurut Judith N. Martin dan Thomas K. Nakayama (dalam Alkatiri, 2014), orang-orang yang hidup dalam perbedaan budaya, baik usia, kemampuan diri, jenis kelamin, etnis, golongan, agama, ras, atau perbedaan bangsa, jika perbedaan-perbedaan dan kesamaan keadaan tersebut dapat disikapi secara berimbang, maka harmonisasi pergaulan dan hubungan akan terjaga bahkan dengan mempelajari budaya orang lain, seseorang akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda.

Mengingat Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya, sebuah upaya untuk memahami antar budaya merupakan sebuah langkah penting. Salah satunya adalah dengan manifestasi dari ruang publik Jurgenn Habermas. Pendidikan kesadaran multikultural melalui ruang publik pada hakikatnya berlangsung atas dasar tindakan-tindakan komunikatif yang dinyatakan oleh Habermas (1984; dalam Supartiningsih, 2012) sebagai pengembangan konsep rasionalitas kehidupan bersama.

Dialog rasional merupakan salah satu dasar terpenting untuk mewujudkan kehidupan bersama secara damai dengan segala keragaman latar budayanya (Supartiningsih, 2017). Dengan demikian, ruang publik berfungsi sebagai wadah untuk dialog rasional yang mendidik antar kelompok, sehingga mereka dapat hidup bersama dan mencapai perdamaian meskipun memiliki latar belakang budaya yang beragam.

Ruang diskusi merupakan salah satu implementasi dari pendapat Jurgenn Habermas tentang ruang publik. Menurut Habermas (dalam Badilo, 2017) mengatakan bahwa, ruang publik adalah ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul membentuk suatu publik, untuk memperbincangkan masalah publik. Ruang publik sendiri bersifat terbuka bagi siapa saja dan tidak berkonsentrasi terhadap kekuasaan dalam bentuk perintah yang memecah belah namun memangkas prinsip yang jadi landasan aturan tersebut. Ruang publik harus berisikan masyarakat privat itu sendiri tujuannya agar bebas dari kendali pemerintahan sehingga opini publik dapat terbentuk untuk mencapai konsensus sosial yang bebas dari sensor dan dominasi.

Pada awalnya ruang publik muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik. Ruang publik borjuis dengan demikian merupakan ruang dari orang-orang privat yang berkumpul bersama sebagai publik. Negara diajak berdebat tentang isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial

Pada titik semacam ini, kekhawatiran Jurgenn Habermas menemukan koordinatnya. Habermas memprihatinkan ruang publik yang hilang, di mana masyarakat bisa bertukar informasi, menginteraksikan ide dan opininya dengan santai dan tanpa tendensi politis tertentu. Kalau Habermas melihat salon-salon di Perancis dan café-café di Inggris sebagai ruang publik yang hilang, Indonesia punya banyak warung kopi, punya banyak tahlilan dan kenduren, yang bisa

menjadi tawaran ruang publik yang terbuka dan egaliter (Hasanudin, 2018).

Ruang diskusi merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita Habermas tentang ruang publik, yaitu sekelompok masyarakat yang berkumpul untuk membicarakan atau berdiskusi terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Dalam pandangan Habermas, ruang publik dan ruang diskusi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat sipil yang sehat. Ruang publik memungkinkan semua individu berpartisipasi dalam percakapan sosial yang inklusif, sedangkan ruang diskusi memberikan struktur untuk membahas isu-isu penting secara mendalam. Keduanya mendukung proses demokrasi dan emansipasi individu dari penindasan sosial dan politik.

Majelis Maiyah merupakan suatu komunitas yang dapat menghimpun berbagai lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi dengan menghadirkan wajah baru pada dunia komunitas di Indonesia. Pada umumnya majelis merupakan suatu kumpulan individu yang terdiri dari latar belakang dan pandangan yang sama. Hal tersebut berbeda di dalam Majelis Maiyah, di mana Majelis Maiyah dalam kenyataannya terdiri dari kumpulan individu yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan beragam (Sohibul, 2022).

Maiyah menjadi ruang milik publik yang memberikan keleluasaan bagi pengunjungnya untuk melakukan banyak hal. Isu-isu yang berkembang di masyarakat selalu coba dihadirkan dalam tiap gelaran Maiyah. Maiyah juga berperan sebagai saluran atau media komunikasi publik yang menandai bangkitnya kesadaran masyarakat untuk membentuk opini publik dan memberikan tanggapan langsung terhadap apapun yang menyangkut kepentingan mereka. Inklusivitas dan egaliter dalam perbincangan di Maiyah

menjadikan Maiyah sebagai arena perbincangan yang nyaman bagi siapa saja (Ihwani, 2020).

Salah satu Majelis Maiyah yang bertempat di Surabaya adalah BangBang Wetan, merupakan sebuah forum diskusi yang pertama kali didirikan pada tahun 2006, mempunyai tujuan yaitu *sinau bareng* serta menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti *liberte, egaliter, fraternite* yang berarti kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Forum ini selalu dilaksanakan sehari setelah bulan purnama pada penanggalan Jawa atau Hijriah yang mengikuti pola revolusi bulan. BangBangWetan merupakan sebuah produk dari sebuah pandangan yang bernama Maiyah, Maiyah sendiri diprakarsai oleh Emha Ainun Nadjib atau yang biasa dikenal dengan Cak Nun, dengan forum diskusi pertama yaitu Padhangmbulan yang bertempat di Sumobito, Jombang pada tahun 1994. Lalu menyebar di berbagai kota dan daerah di Indonesia, Seperti Kenduri Cinta di Jakarta, Gambang Syafaat di Semarang, Mocopat Syafaat di Yogyakarta, dan BangBang Wetan di Surabaya.

BangBang Wetan adalah sebuah komunitas yang memiliki konsep forum diskusi yang berbeda, dengan mengedepankan asas *sinau bareng*, siapapun dapat memberikan opini terhadap sebuah tema terlepas dari narasumber yang dihadirkan dalam forum tersebut. Suasana *gayeng* mendorong siapapun dari berbagai latar belakang untuk mengikuti forum diskusi tanpa terbentur oleh tembok batasan yang diberikan oleh forum diskusi konvensional seperti di universitas, seminar, maupun di ruang kelas. Dengan meniadakan hierarki narasumber dan audiens, dapat mendorong audiens untuk terbuka dan tidak monoton.

Peran atau latar belakang budaya seorang tokoh sangat berpengaruh dalam memperluas pesan

kepada khalayak. Sebagaimana penelitian yang berjudul “Kritik Sosial Pada Pemerintah” mengatakan “Latar belakang budaya seorang komunikator juga harus diteliti lebih jauh. Bintang Emon berasal dari suku Betawi yang mana dikenal memiliki gaya bicara yang ceplas-ceplos.” (Pratama, Febrianita, Chairil, 2023). Begitu juga dengan Cak Nun, latar belakang budayawan menjadi cara yang kuat untuk menyampaikan pesannya. Sebagaimana Husaein (2015) mengatakan bahwa Cak Nun lebih dominan menggunakan bahasa kebudayaan dan kesenian untuk menghidupkan spiritualitas audien serta mampu menyatukan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Konsep ruang publik dalam lingkup antar budaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia. Ruang publik menghadirkan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan juga sebagai tempat untuk mengaktualisasi diri. *Sinau bareng* yang dilakukan oleh kelompok Maiyah di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi dari ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas.

Habermas (dalam Haezer, 2018), menyebutkan tiga kriteria ruang publik. Kriteria tersebut disarikannya dari kecenderungan yang terjadi dalam ruang publik berupa kedai kopi, salon, dan *tischgesellschaften*. Kriteria-kriteria itu adalah :

Pertama, egaliter atau kesetaraan status. Dalam ruang publik, status cenderung dikesampingkan atau dengan kata lain, bentuk hubungan sosial yang tercipta, jauh dari mengangankan kesetaraan status. Kesetaraan atau persamaan status ini, penting karena menjadi landasan bagi pengukuhan argumen yang lebih baik dalam memenangkan perlawanan terhadap hierarki sosial.

Kedua, bebas dari dominasi. Dalam ruang publik yang terwujud di salon, kedai kopi, dan *tischgesellschaften* di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-19, pembicaraan yang berlangsung menyangkut permasalahan-permasalahan yang masuk dalam wilayah “kepedulian umum”. Namun pembicaraan-pembicaraan tersebut berlangsung dengan mengesampingkan dominasi atau otoritas dari gereja dan negara yang dalam konteks saat itu memegang monopoli terhadap segala interpretasi, baik dalam filsafat, sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Ketiga, inklusif. Dalam ruang publik, inklusivitas publik tercipta karena pada dasarnya setiap masalah yang diperbincangkan adalah persoalan-persoalan umum yang harus bisa dan mudah untuk diakses setiap orang. Dengan kata lain setiap orang harus sanggup berpartisipasi di dalamnya.

Ruang publik seharusnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan komersial atau kendali negara, karena dalam pandangan awalnya, ruang publik sudah seharusnya terlepas dari kekuasaan dominan dan berfungsi untuk mengoreksinya. Ruang publik identik dengan perdebatan rasional dan kritis, tempat masyarakat dapat bebas menyampaikan pendapat, berbicara, menikmati kebebasan pers, serta berkumpul. Ruang publik berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan suara mereka. Oleh karena itu, ruang publik yang ideal adalah ruang yang bebas, terbuka, transparan, tanpa intervensi pemerintah atau pihak lain, dan yang paling penting adalah dapat diakses oleh semua orang. Ruang publik menjadi ‘tempat pengeraman kegelisahan politis warga’ yang menghendaki perubahan (Yudhistira, 2012).

Menurut Yudhistira (2012), Postulat-postulat ruang publik borjuis

menurut Habermas yaitu: Pertama, para anggotanya adalah warga biasa yang tidak berelasi terhadap kekuasaan. Kedua, menjadi mediasi antara ruang privat dan ruang otoritas publik. Ketiga, sebuah diskusi terbuka tentang segala isu dalam persoalan umum yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keempat, ruang publik mengandaikan kebebasan berbicara dan berkumpul, kesetaraan, pers bebas, dan hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam debat politik. Kelima, ruang publik pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan mengamati kasus dari berbagai sumber data yang digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif, berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif peneliti berusaha melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu data bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung dan terlibat dalam kegiatan Majelis Masyarakat Maiyah BangBang Wetan Di Surabaya untuk mengamati, memahami, dan mendapatkan data tentang bagaimana BangBang Wetan sebagai ruang publik antar budaya. Serta penulis mendengarkan keterangan dari informan, dan menerima sudut pandang yang berbeda dari apa yang akan diteliti dan diucapkan oleh informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen. Sumber data berupa hasil wawancara, temuan observasi, dan

dokumen yang ada relevansinya. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, dalam penelitian ini adalah pegiat BangBang Wetan dan Jamaah BangBang Wetan. Dari setiap aspek informan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penelitian peneliti secara obyektif tentang bagaimana BangBang Wetan sebagai ruang publik (*public sphere*) antar budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam setiap diskusi BangBang Wetan selalu memegang teguh nilai-nilai Maiyah yang menjadi dasar terjadinya sebuah forum diskusi. Ruang Publik yang ditawarkan atau dilakukan sesuai dengan apa yang Habermas inginkan. Ruang publik yang sepenuhnya milik masyarakat tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Kehadiran audiens yang bersifat sukarela, tidak memberikan pagar bagi mereka yang tidak memiliki tempat untuk menyuarakan keluhan-kesahnya, demikian halnya dengan bagaimana pendapat-pendapat diutarakan dan didengarkan.

Tanpa melihat subjek yang berbicara, di dalam BangBang Wetan diajarkan untuk tetap memiliki pemikiran terbuka dan berusaha menyerap segala informasi atau pendapat individu tersebut. Menurut Habermas, prinsip ruang publik tercermin dalam suatu dialog terbuka mengenai berbagai masalah yang bersifat umum, di mana argumen yang disampaikan secara diskursif mengedepankan kepentingan publik. Selain itu, ruang publik juga mengasumsikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers yang bebas, serta hak individu untuk berpartisipasi tanpa halangan dalam perdebatan politik dan proses pengambilan keputusan.

Segala hal yang terjadi dalam BangBang Wetan bersikap sukarela, baik secara pelaksanaan acara, kesiapan materi, bahkan secara sukarela

menyiapkan kesadaran untuk ikut aktif dalam setiap kesempatan diskusi, melempar dan memberikan pertanyaan maupun jawaban terkait materi diskusi. Dialog antar individu juga terjadi, bahkan jika memungkinkan tidak hanya terjadi hanya dengan satu kali kesempatan, dapat terjadi beberapa kali.

Dalam pemaparan ruang publik oleh Habermas, hal yang sedang dilakukan BangBang Wetan dengan audiens disebut debat dan konsensus, di mana setiap topik atau tema dibahas bersama melalui komunikasi yang intens. Komunikasi dalam forum Bang Bang Wetan tercermin melalui sesi dialog, mengingat keterbukaan menjadi ciri utamanya dan melahirkan apa yang disebut Habermas sebagai opini publik.

Keberagaman dalam BangBang Wetan diterima secara alami dan tanpa penghakiman, menjadikan tempat ini sebagai forum "*sinau bareng*" (belajar bersama) yang terus berlanjut dengan semangat saling memahami dan berbagi. Hal ini tercermin dalam praktik kebebasan tanpa sekat antara laki-laki dan perempuan, serta keterlibatan masyarakat umum dalam kegiatan BangBang Wetan. Merawat ruang publik seperti BangBang Wetan memerlukan konsistensi dalam mempertahankan nilai-nilai inklusif yang ada, serta melibatkan komunitas setempat dalam setiap kegiatannya untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi forum ini bagi generasi mendatang.

BangBang Wetan juga memberikan contoh bahwa pentingnya otonomi atas diri sendiri dalam menjaga keberlanjutan ruang publik tercermin dalam cara BangBang Wetan merancang diskusi dan memilih tema secara mandiri, tanpa gangguan atau konflik kepentingan dari pihak lain. Nilai-nilai yang ditanamkan Mbah Nun—termasuk kebebasan berbicara, saling menghargai, dan terbuka terhadap kritik—menjadi landasan penting untuk menghindari

konflik kepentingan dan menjaga integritas forum. Pada akhirnya, BangBang Wetan berkomitmen untuk tetap menjadi ruang publik yang independen, adil, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara sukarela dan tanpa tekanan eksternal.

BangBang Wetan tidak hanya memberikan ruang bagi ide dan gagasan, tetapi juga menciptakan suasana diskusi yang membuat anggotanya merasa diterima, nyaman, dan dihargai. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme anggota yang bertahan hingga larut malam meskipun ada tanggung jawab lain, serta perasaan puas yang dirasakan peserta karena dapat memperluas wawasan dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Secara keseluruhan aspek, BangBang Wetan berhasil menjadi ruang publik yang produktif, nyaman, dan mengayomi, dengan menciptakan sebuah lingkungan ruang publik yang mengutamakan kebebasan, rasa saling menghargai, dan keterbukaan terhadap perbedaan.

SIMPULAN

Setelah melakukan proses wawancara mendalam, peneliti dapat menyimpulkan dan dapat mengetahui bagaimana BangBang Wetan sebagai ruang publik antar budaya. BangBang Wetan sebagai ruang publik antar budaya yang memiliki sesuatu yang unik, serta BangBang Wetan secara konsisten selama 18 tahun menjadi sebuah wadah bagi masyarakat majemuk untuk berkumpul, berserikat dan menyuarakan pendapat. Peneliti melihat bahwa BangBang Wetan adalah sebuah oase yang terjadi di tengah disrupsi demokrasi yang terjadi saat ini Hal ini juga menjaga masyarakat tetap sadar, tetap kritis, dan tetap memiliki semangat ruang publik yang dicita-citakan oleh Jurgen Habermas.

Dalam melakukan prinsip egaliter BangBang Wetan melakukan

kegiatan ruang diskusi yang terbuka dan setara karena hal ini dapat memperkuat rasa kebersamaan, menumbuhkan solidaritas antar anggota terlebih jika mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik secara budaya, agama, pekerjaan dan lingkungan. Inklusifitas yang ditawarkan oleh BangBang Wetan benar benar terlaksana, dilaksanakan dengan cara mengakomodasi keberagaman yang memang nyata ada di masyarakat. Tidak menerapkan batasan bagi individu atau siapapun yang ingin menghadiri BangBang Wetan. Karena secara sadar, hal ini dapat memberikan rasa kepercayaan diri bagi mereka yang termarginalkan. Prinsip bebas dari dominasi dilakukan mengingat pentingnya otonomi atas diri mereka sendiri untuk menghindari gangguan dari kekuasaan absolut.

DAFTAR PUSTAKA

Alkatiri, J. (2015). Ahmadiyah Qadian Dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya: Kajian Tentang Agama Di Ruang Publik. Penerbit Pondok Pesantren Qothrotul Falah.

Badilo, A. (2017). Facebook E100 Suara Surabaya sebagai Ruang Publik: Analisis Isi Kualitatif terhadap Postingan Akun Facebook E100 Milik Radio Suara Surabaya . Universitas Kristen Satya Wacana.

Buroq, Sohibul (2022) Sejarah perkembangan majelis Maiyah Bangbang wetan sebagai simpul Maiyah di Surabaya : 2006-2022. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hasanudin, M. (2018). Menemukan Kembali Ruang Publik di Sinau Bareng. Caknun.com. Retrieved November 8, 2024, from <https://www.caknun.com/2018/menemukan-kembali-ruang-publik-di-sinau-bareng/>

Husaein, A. S. (2015). Karakteristik Komunikasi Emha Ainun Nadjib Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Forum Maiyah Mocapat Syafaat.

Ihwani, N. (2020). Melacak Keberadaan Ruang Publik (Rasionalitas Komunikatif Maiyah Sebagai Representasi Ruang Publik).

Pratama, A. C. J., Febrianita, R., & Chairil, A. M. (2023). Kritik Sosial Pada Pemerintah. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 185-198.

Supartiningsih. (2012). Multikulturalisme Dalam Perspektif Etika Diskursus Jurgen Habermas. *Prosiding Seminar Internasional Multikultural Dan Globalisasi 2012*. Depok: Universitas Indonesia.

Supartiningsih, S. (2017). Etika diskursus bagi masyarakat multikultural: Sebuah analisis dalam perspektif pemikiran Jürgen Habermas. *Jurnal Filsafat*, 17(1), 32-59.

Yudhistira, J. F. (2012). Forum Bang Bang Wetan Dalam Perspektif Jurgen Habermas. In Universitas Airlangga, *Program Magister Sosiologi*